



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu adanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV /2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran : 2024

Tugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kudus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus serta hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kudus, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
8. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kudus dan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kudus kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kudus;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus dan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus;
4. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kudus;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Kudus; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kudus.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat	$\frac{\text{Publikasi Informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas
Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga	Nilai akuntabilitas kinerja	Subbagian Rendatin
	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Kabupaten Kudus	Opini BPK	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga	Nilai Indek Reformasi	Subbagian Rendatin
	Nilai keterbukaan informasi publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Subbagian TPPHupmas
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{jumlah total pemilih}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi}}{\text{jumlah total pemilih}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi}}{\text{jumlah total pemilih}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi Dptb} - \text{Target Dptb})}{\text{jumlah target pemilih DPTb yang tidak masuk DPT}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas
	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah TPS}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{1 \text{ kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian TPPHupmas
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kudus	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Subbagian Hukum Dan SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Heddy Ardhani Araminta Putri

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL